

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BATAM

Tri Irma Ningrum

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawisata Tamansiswa

Trieirma07@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of human resource quality, utilization of information technology, and the implementation of accrual government-based accounting standards on the quality of financial statements of religious courts of Batam.

We the primary data from contains 47 questionnaire The population all employees who work in the religious court of Batam. We use saturated sampling method.

We find that multiple linear regression equation is $Y = 39,882 + 0,080X_1 + 0,0170X_2 + 0,477X_3 + e$. The implementation of accounting standards of government based on accruals has a significant effect on the quality of financial report of religious court of Batam, while the quality of human resources, and the utilization of information technology has no significant effect on the quality of financial report of the religious court of Batam.

Keywords: *Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Implementation of Accrual Based Accounting Standards, Quality of Financial Relatif, Religious Count of Qountum*

PENDAHULUAN

Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Pengadilan agama Batam adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pengadilan agama Batam mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pengadilan agama Batam dituntut untuk melaksanakan pengelolaan secara transparan dan akuntabel.

Fenomena yang terjadi pada pengadilan agama Batam saat ini ialah kurang lengkapnya penyusunan laporan keuangan oleh pihak pengadilan agama Batam. Beberapa transaksi banyak terlewatkan (tidak masuk dalam pencatatan). Selain itu, sering terjadinya keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Hal ini disebabkan sumber daya manusia di pengadilan agama Batam masih kurang kompeten atau kurang memahami mengenai

akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. Pegawai pengadilan agama Batam tidak hanya bertanggung jawab pada satu bidang pekerjaan saja karena adanya rangkap bidang pekerjaan. Pengadilan agama Batam telah menyediakan teknologi informasi yang memadai untuk menunjang kinerja, namun, sumber daya manusianya memilih menggunakan sistem manual dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, aplikasi yang sudah disediakan satuan kerja KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) jarang *ter-update* di pengadilan agama Batam. Dengan demikian, data yang terkomputerisasi sangat rendah.

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan lebih sistematis menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di Indonesia, serta tantangan di era globalisasi sekarang ini yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya akuntansi pemerintahan (Ledo dan Ayem, 2017:162,163). Namun adopsi basis akrual ini, sepertinya tidak memperhatikan kondisi kualitas pengelolaan keuangan dan lingkungan pemerintahan di Indonesia sekarang ini, khususnya pengadilan agama Batam.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dukungan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi yang memadai dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual juga dapat mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Arumsari, 2016:20). Sumber daya manusia yang mampu memahami logika akuntansi dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi secara baik dan mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan (Arumsari, 2016:8). Penelitian Windiasturi (2013:6) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Putri dkk (2017:6) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Bandung.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kemungkinan salah saji dalam penyusunan laporan keuangan sehingga keandalan laporan keuangan semakin meningkat (Arumsari, 2016:9). Penelitian Nurillah (2014:7) menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Harnoni (2016:12) yang menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual merupakan hal ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pengadilan Agama Batam. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi pengadilan agama Batam untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Arumsari (2016:22). Penelitian kiranayanti dan Erawati (2016:24) menghasilkan bahwa PSAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Inapty (2016:12) yang menghasilkan bahwa PSAP berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini akan merujuk pada penelitian Rahmi Syafarina (2016) mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai

Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian terletak pada penambahan variabel independen, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Peneliti akan menguji kualitas laporan keuangan pada pengadilan agama Batam. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diperoleh hasil yang berbeda-beda. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam.”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Widodo (2001:77) mendefinisikan perubahan membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Ariesta (2013:23) sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Berdasarkan teori di atas dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan oleh penelitian Windiastuti (2013:6), Kiranayanti dan Erawati (2016:24), Penelitian Ihsanti (2014:16), Andriyani (2016:80), Susanti (2018:84), Marlinawati (2018:8). Namun, hasil penelitian mereka bertolak belakang dengan hasil penelitian Putri dkk (2017:6) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Bandung.

H₁: Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Suparman dkk, 2014:3). Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, *mini*, *micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet electronic commerce*) dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011:22). Teknologi informasi salah satunya teknologi komputer (*hardware* dan *software*) berfungsi untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, serta berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan apabilitas sistem. Kesalahan dalam proses data akan berkurang ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan teori di atas dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan oleh penelitian Nurillah (2014:7), Kurniawan (2016:57), Yuliani dkk (2010:13), Maksyur (2015:12), Lubis (2014:96), Kusuma dkk (2016:4139). Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Harnoni (2016:12) yang menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sejak terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pemerintah pusat telah menggunakan aplikasi akuntansi yang telah memenuhi basis akuntansi yang digunakan saat itu, yaitu basis akuntansi kas menuju akrual. SAP kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 59/PMK.05/2005 yang kemudian disempurnakan dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007. Aplikasi yang dibangun dan dipelihara selama ini telah mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini terbukti dengan hasil opini audit BPK yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Aplikasi yang digunakan berupa aplikasi SAI yang terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN termasuk aplikasi persediaan. Aplikasi-aplikasi tersebut menghasilkan laporan finansial maupun laporan manajerial.

Berdasarkan teori di atas dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan oleh penelitian Ningtyas dan Widyawati (2015:13), Triwardana (2017:12), kiranayanti dan Erawati (2016:24). Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Inapty (2016:12) yang menghasilkan bahwa PSAP berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kausal. Studi kasualitas mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, studi kasulitas mempertanyakan masalah sebab akibat (Kuncoro, 2013:15).

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel terikat dan 3 (tiga) variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂), penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X₃).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai menjadi penyangga utama dan sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Modo,dkk 2016:18 dan 20). Variabel kualitas sumber daya manusia menggunakan kuesioner yang mencakup 6 indikator dan terdiri dari 13 item pernyataan.

Tabel 1
Pengukuran Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator	Item Pernyataan
1. Kemampuan individu (Nihayah, 2015:8)	1. Pengadilan agama Batam memiliki staf yang mampu menyusun laporan keuangan pengadilan agama Batam sesuai standar akuntansi. 2. Staf pengadilan agama Batam belum mampu menyusun laporan keuangan pengadilan agama Batam (skor dibalik).
2. Tingkat pendidikan (Arfianti, 2011)	3. Staf pengadilan agama Batam mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini.
3. Pengalaman bidang akuntansi	4. Staf pengadilan agama Batam memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi. 5. Staf pengadilan agama Batam sudah berpengalaman di bidang akuntansi, sehingga dapat membantu mereka mengurangi kesalahan dalam bekerja.
4. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan (Arfianti, 2011)	6. Pengadilan agama Batam memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas. 7. Peran dan tanggungjawab seluruh staf pengadilan agama Batam ditetapkan secara jelas dalam peraturan pengadilan agama Batam.
5. Memahami prosedur dan proses akuntansi (Arfianti, 2011)	8. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi. 9. Uraian tugas staf pengadilan agama Batam sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. 10. Pengadilan agama Batam telah melakukan proses akuntansi. 11. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.
6. Pelatihan yang teratur (Alfianti, 2011)	12. Pelatihan-pelatihan untuk membantu pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan. 13. Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Zuliarti, 2012:47). Variabel pemanfaatan teknologi informasi akan diukur menggunakan 5 indikator dengan 9 pernyataan pada kuesioner.

Tabel 2
Pengukuran Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	Item Pernyataan
1. Proses kerja secara elektronik (Pramudiarta, 2015:47)	1. Pengadilan agama Batam memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. 2. Komputer yang dimiliki pengadilan agama Batam masih dalam jumlah yang terbatas (skor dibalik).
2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan (Nihayah, 2015:9)	3. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan pengadilan agama Batam menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan atau terkomputerisasi.
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet (Pramudiarta, 2015:47)	4. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja Pengadilan agama Batam. 5. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Sistem manajemen (Pramudiarta, 2015:47)	6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer (Nihayah, 2015:9)	7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. 9. Sistem keamanan komputer (antivirus) diperbarui secara teratur.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan standar akuntansi publik berbasis akrual sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menggunakan kuesioner yang mencakup 8 indikator dan terdiri dari 14 item pernyataan.

Tabel 3

Pengukuran Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Indikator	Item Pernyataan
1. Penerapan basis akrual dan basis kas (Arumsari 2016:67).	1. Penyusunan anggaran dan LRA belum `disusun berdasarkan basis kas. (skor dibalik)
2. Komponen laporan keuangan (Arumsari, 2016:68).	2. Penyusunan anggaran dan LRA sudah disusun berdasarkan basis kas.
3. Pengakuan pendapatan-LO (Arumsari, 2016:68).	3. Komponen laporan keuangan pengadilan agama terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAI, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Pengakuan pendapatan-LRA (Arumsari, 2016:68).	4. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
5. Pengakuan beban (Arumsari, 2016:68).	5. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
6. Pengakuan belanja (Arumsari, 2016:68).	6. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
7. Pengakuan penyusutan aset lengkap (Arumsari, 2016:68).	7. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran atau saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut yang telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan
9. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (Arumsari, 2016:68).	8. Pengadilan agama memperhitungkan nilai penyusutan aset tetap sesuai dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang digunakan.
	9. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dan laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
	10. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
	11. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
	12. Laporan arus kas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai empat karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No 71 Tahun 2010). Variabel kualitas laporan keuangan akan diukur menggunakan 9 indikator dengan 20 pernyataan pada kuesioner.

Tabel 4

Pengukuran Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Indikator	Item Pernyataan
1. Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan (Sukmaningrum, 2012:41)	1. Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
	2. Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu (<i>feedback value</i>).
	3. Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive value</i>).
2. Ketepatan pelaporan laporan keuangan	4. Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.

(Sukmaningrum, 2012:41)	
3. Kelengkapan informasi yang disajikan (Sukmaningrum, 2012:41)	5. Informasi dalam laporan keuangan dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.
4. Penyajian secara jujur	6. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
5. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi (Sukmaningrum, 2012:41)	7. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, teruji kebenarannya.
6. Informasi yang bersifat netralitas (Sukmaningrum, 2012:41)	8. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pengadilan agama Batam.
	9. Informasi yang dihasilkan dalam laporan pengadilan agama Batam tidak berpihak pada kepentingan pihak manapun melainkan diarahkan pada kebutuhan umum.
	10. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pengadilan agama Batam berpihak pada salah satu pelaksana operasional (skor dibalik).
7. Keakuratan informasi yang disajikan (Sukmaningrum, 2012:41)	11. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pengadilan agama Batam bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.
	12. Laporan keuangan disampaikan secara sistematis dan teratur.
	13. Informasi yang dibutuhkan belum tersedia ketika diminta (skor dibalik).
8. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya (Sukmaningrum, 2012:41)	14. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
	15. Dalam penyusunan laporan keuangan, staf pengadilan agama Batam telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
	16. Staf pengadilan agama Batam selalu menggunakan kebijakan akuntansi sama dari tahun ke tahun.
9. Kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan (Sukmaningrum, 2012:41)	17. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pengadilan agama Batam telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.
	18. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pengadilan agama Batam, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
	19. Laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.
	20. Laporan keuangan yang disajikan mengandung makna yang bersifat ambigu (ganda) (skor dibalik).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di pengadilan agama Batam, yaitu sebanyak 105 orang.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan dengan sebenarnya, maka dilakukan *pilot test* terlebih dahulu untuk mengetahui apakah instrumen penelitian tersebut sudah layak digunakan dalam penelitian yang sebenarnya. *Pilot test* pada penelitian ini dilakukan dengan menyebar 30 kuesioner kepada 30 pegawai pengadilan agama Batam. Kuesioner disebar pada tanggal 19 Januari 2018 - 22 Januari 2018. Seluruh kuesioner tersebut dapat diolah.

Berdasarkan hasil pengujian validitas data dari 56 item pernyataan dinyatakan valid sebanyak 47 item ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel } 0,3961$), sedangkan yang tidak valid sebanyak 9 item ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel } 0,3961$). 3 item pernyataan yang tidak valid telah menyebabkan indikator yang diwakilinya dihapus. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya butir pernyataan lain yang valid yang dapat mewakili indikator tersebut. Alasan butir pernyataan tidak valid semua dari indikator tersebut adalah kurang adanya sumber daya manusia yang kompeten di pengadilan agama Batam, sehingga indikator ini tidak diperlukan lagi sebagai dasar penyusunan item pernyataan dalam kuesioner. Dengan demikian, butir pernyataan yang tidak valid harus dieliminasi supaya dalam penyebaran kuesioner selanjutnya dilakukan tanpa mencantumkan butir yang dieliminasi tersebut. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, setiap variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih tinggi dari 0,600. Dengan demikian instrumen penelitian ini dapat digunakan kembali pada penyebaran kuesioner selanjutnya guna mengumpulkan data.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan *software Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 17.0. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner akan diolah melalui beberapa tahap pengujian yang terdiri dari:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro, 2013:172).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ini menggunakan metode *alpha cronbach's* yang dimana satu kuesioner dianggap reliabel apabila *cronbach's alpha* $> 0,600$ (Kuncoro, 2013:175).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Persamaan regresi dinyatakan baik apabila mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunnyoto, 2007:99). Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah residu model berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas ditentukan dengan cara menentukan nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (α) dan nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)* adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat (Sunnyoto, 2007:57). Masalah multikolinieritas diuji dengan melihat *tolerance value* kurang dari 0,1 atau nilai *variance inflation factor* lebih dari 10 (Ghozali 2011:19).

c. Uji Heteroskedastisitas

Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi: $|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$ (Ghozali, 2011:142). Jika $p \text{ value} > 0,05$ tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crossection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

3. Teknik Analisis Data

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih, berikut ini merupakan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. Cara yang dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,05$ (Sugiyono, 2011:194).

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Cara yang dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan $\alpha = 0,05$ (Sugiyono, 2011:194).

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat ukur mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012:97).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Kuesioner disebar di pengadilan agama Batam sebanyak 105 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data kuesioner yang diterima kembali sebanyak 88 kuesioner dari 105 kuesioner yang disebar. Jumlah kuesioner yang dapat diolah hanya 88 kuesioner, dan jumlah kuesioner yang tidak sah sebanyak 3 kuesioner dari 91 kuesioner yang diterima.

Tabel 5
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Responden PA Batam	Persentase
1	Jumlah Kuesioner yang Disebar	105	100%
2	Jumlah Kuesioner yang Kembali	91	86,67%
3	Jumlah Kuesioner yang Tidak Sah	3	3,30%
4	Jumlah Kuesioner yang Tidak Kembali	14	13,33%
5	Jumlah Kuesioner yang Diolah	88	96,70%

Gambaran Umum Responden

Demografi responden menjelaskan tentang gambaran umum responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status perkawinan dan penghasilan pertahun pegawai pengadilan agama Batam.

Tabel 6
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	55	62,5%
	Perempuan	33	37,5%
Usia	21 – 30 tahun	20	22,73%
	31 – 40 tahun	40	45,45%
	41 – 50 tahun	25	28,41%
	> 51 tahun	3	3,41%
Pendidikan terakhir	SMA/Sederajat	28	31,82%
	D3	1	1,14%
	S1	26	29,55%
	S2	23	26,13%
	S3	10	11,36%
Status Pernikahan	Belum Menikah	1	1,14%
	Menikah	87	98,86%
Penghasilan Tahunan	25-50jt	0	0%
	51 – 100jt	11	12,5%
	101 – 150jt	67	76,14%
	151 – 200jt	10	11,36%

Analisis Data

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 17,0. Hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* yang berada diatas r-tabel 0,2096 dan nilai signifikan 0,000 dibawah nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah data reliabel atau tidak dengan standar nilai *cronbach' alpha* lebih tinggi dari 0,600 dan dilakukan dengan bantuan SPSS versi 17.0.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 7 di bawah ini, maka data dinyatakan terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,463 dan nilai signifikansi sebesar 0,983 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov test

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		88
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	5.33072281
Most Extreme Differences	Absolute	0,049
	Positive	0,042
	Negative	-0,049
Kolmogorov-Smirnov Z		0,463
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,983

Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17.0, penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Variabel sumber daya manusia memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,792 dan nilai VIF sebesar 1,262. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,711 dan nilai VIF 1,402. Nilai *tolerance* sebesar 0,752 dan nilai VIF 1,331 dimiliki oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Tabel 8 dibawah ini menyajikan hasil uji multikolinieritas:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		<i>Collinearity Tolerance</i>	<i>Statistics VIF</i>
1	(Constant)		
	Kualitas Sumber Daya Manusia	0,792	1.262
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,711	1.402
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	0,752	1.331

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer diolah 2018

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data yang diolah dengan bantuan SPSS versi 17.0. Penelitian ini dikatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang berada diatas 0,05. Berdasarkan tabel 9 nilai signifikansi dari kualitas sumber daya manusia sebesar 0,810. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,333. Nilai signifikansi dari penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah 0,566.

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	B	Std Error	Beta	T	Sig

1	(constant)	4,018	4,502	0,892	0,375
	Kualitas Sumber Daya Manusia	-0,032	0,132	-0,029	0,810
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,118	0,121	0,125	0,333
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	-0,050	0,087	-0,072	0,566

a. Dependent Variabel: AbsRES

Sumber: Data Primer diolah 2018

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 7 dapat dihasilkan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 39,882 + 0,080X_1 + 0,170X_2 + 0,477X_3 + e$$

Tabel 10

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(constant)	39,882	7,428		5,369	0,000
	Kualitas Sumber Daya Manusia	0,080	0,218	-0,029	0,367	0,714
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,170	0,199	0,125	0,853	0,396
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	0,477	0,143		3,332	0,001

a. Dependent Variabel: KLIK

Sumber: Data Primer diolah 2018

Tabel 10 menjelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai t hitung 0,367 lebih kecil dari t tabel 1,66320 dan nilai signifikansinya 0,714. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam.
2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi nilai t hitung 0,853 lebih kecil dari t tabel 1,66320 dan nilai signifikansinya 0,396. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam.
3. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual nilai t hitung 3,332 lebih besar dari nilai t tabel 1,66320 dan nilai signifikansinya 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam.

Hasil Uji Model (Uji F)

Pada tabel 8 dibawah ini menggambarkan hasil uji simultan (uji F) yang menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Uji signifikansi simultan juga dapat diperhitungkan atas nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Nilai F hitung dalam

penelitian ini adalah 7,019 yang berada di atas nilai F tabel, yaitu 2,71. Dengan demikian, ketiga variabel independen, yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam.

Tabel 11
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA (b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	619,744	3	206,581	7,019	,000 ^a
	Residual	2.472,245	84	29,431		
	Total	3.091,989	87			

a. Predictors: (Constant), PSAP, KSDM, PTI

b. Dependent Variable: KLIK

Sumber Data Primer diolah 2018

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 12
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,448 ^a	0,200	0,172	5,425

a. Predictors: (constant), PSAP, KSDM, PTI

Sumber Data Primer diolah 2018

Berdasarkan Tabel 12 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,172 atau 17,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam sebesar 17,2%, sedangkan sisanya 82,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Hipotesis 1: Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam

Pada penelitian ini, hipotesis 1 yang diajukan adalah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai t hitung 0,367 lebih kecil dari t tabel 1,66320 dan nilai signifikansinya 0,714. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam. Dengan demikian, H₁ ditolak dan H₀ terdukung.

Hipotesis 2: Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam

Pada penelitian ini, hipotesis 2 yang diajukan adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai t hitung 0,367 lebih kecil dari t tabel 1,66320 dan nilai signifikansinya 0,714. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam. Dengan demikian H_2 ditolak dan H_0 terdukung.

Hipotesis 3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam.

Pada penelitian ini, hipotesis 3 yang diajukan adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam. Hasil uji hipotesis 3 menyimpulkan bahwa nilai t hitung 3,332 lebih besar dari nilai t tabel 1,66320 dan nilai signifikansinya 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam. Apabila pengadilan agama Batam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka informasi keuangan yang disajikan lebih akurat, relevan, dan lebih transparan. Dengan demikian, kualitas nilai laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam juga meningkat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap 88 responden pengadilan agama Batam yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi keuangan pengadilan agama dan penyusunan laporan keuangan pengadilan agama Batam, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam. Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam.

Implikasi

Implikasi penelitian ini bagi entitas Lembaga Pemerintah khususnya Pengadilan Agama Batam sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam dapat disebabkan kurangnya jumlah pegawai akuntansi serta latar belakang pendidikan akuntansi pada subbagian akuntansi/tata usaha keuangan. Pada sebaran frekuensi data kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kategori rendah. Jumlah yang tidak cukup serta tidak mempunyai latar pendidikan akuntansi, maka pegawai pengadilan agama kurang dapat menerapkan pengelolaan keuangan pengadilan agama dengan tepat dan baik.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penyediaan teknologi informasi di pengadilan agama Batam sebenarnya sudah cukup memadai. Pada sebaran frekuensi data pemanfaatan teknologi informasi berkategori sedang. Pemanfaatan teknologi informasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam dapat disebabkan oleh aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak tersedia di semua komputer yang telah disediakan tersebut. Sehingga pemanfaatan terhadap teknologi informasi yang ada di pengadilan agama Batam tidak maksimal.
3. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kualitas laporan keuangan pengadilan agama Batam dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pengadilan agama Batam diharapkan memiliki upaya untuk lebih meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan cara pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait yang terlibat langsung secara teknis

dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan pengadilan agama Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pengadilan agama Batam yang dihasilkan menjadi lebih baik dan andal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu pengadilan agama yang berada di wilayah Kepulauan Riau, yaitu pengadilan agama Batam. Dengan demikian, data dan hasil penelitian tidak dapat ditarik kesimpulan yang sama terhadap pengadilan agama lain yang berada di wilayah Kepulauan Riau tersebut.
2. Penelitian ini masih terbatas pada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan atau penambahan variabel bebas lainnya, seperti sistem pengendalian intern.
3. Sumber data penelitian hanya berasal dari kuesioner. Kuesioner ini memiliki keterbatasan dimana hasil yang diperoleh merupakan pendapat responden yang memiliki persepsi berbeda-beda. Selain itu, tanggapan responden dalam mengisi kuesioner belum terjamin keobyektifannya dikarenakan responden yang kurang memahami atau kurang serius dalam mengisi kuesioner.

Saran

Saran untuk penelitian ini, adalah:

1. Pengadilan agama Batam hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan, agar dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan handal.
2. Pengadilan agama Batam agar lebih memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sehingga dalam pengelolaan laporan keuangan dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pengadilan agama Batam dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

Saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya antara lain :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup wilayah penelitian. Lima pengadilan agama lainnya yang berada di wilayah Kepulauan Riau, yaitu: di pengadilan agama Dabo Singkep, pengadilan agama Tanjung Balai Karimun, pengadilan agama Tarempa, pengadilan agama Tanjung Pinang, dan pengadilan agama Natuna.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen selain yang telah digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan masih banyak dan ada kemungkinan variabel tersebut dapat memberi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pengadilan agama. Salah satu variabel yang dapat digunakan adalah sistem pengendalian intern.
3. Penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner untuk memperoleh data dari responden. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode wawancara langsung untuk memperjelas pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (penyuting). 2012. *Teori, konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Alifah, 2014. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada Pk BLU Universitas Negeri Surabaya)". *E-Jurnal.Vol.3.No.12*
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Kabupaten Empat Lawang Sum-sel)". *E-Jurnal.Vol24.No.1*
- Andriyani, Ika. 2016. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten". *Skripsi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Ariesta, Fadila. 2013. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)". *E-Jurnal Universitas Negeri Padang*
- Arina Roshanti, Edi Sujana, Kadek Sinarwati, 2014. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". *E-Jurnal.Vol.2.No:1*
- Asti Arumsari, 2016. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Purworejo)". *Skripsi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Daniel Kartika Adhi, Yohanes Suhardjo. 2013. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)". *E-Jurnal STIE Semarang.Vol.5.No.3*.
- Dian Tri Anggraeni, 2014. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo)". *E-Jurnal.Vol.3.No.3*.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dominikus Ledo, Sri Ayem. 2017. "Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Yogyakarta)". *Jurnal Kajian Bisnis.Vol.25.No.2.Juli.2017*.
- Fitri Susanti, 2016. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)". *E-Jurnal.Vol.2.No.1*
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harnoni. 2016. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas)". *Jom Fekon.Vol.3.No.1.Februari.2016*
- Husna, Fadhilla. 2013 "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)". Artikel Ilmiah, *Universitas Negeri Padang*.
- Ihsanti, 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab.Lima Puluh Kota)". *Jurnal Akuntansi.Vol.2.No.2.Tahun.2014*
- Inapty, dan Martiningsih. 2016. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan". *Jurnal Ilmu Akuntansi.Vol.9, No.1.April.2016*
- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo.2008. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)". *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Kadek Desiana Wati, 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Jurnal Vol.2, No.1*
- Karmila, dkk.2012. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)". *E-Jurnal, Universitas Riau*.
- Kiranayanti, dan Erawati. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Bisnis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Jurnal.Vol.16, No.2.Agustus.2016*
- Kuncoro, M.2013. *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. AMP YKPN.Yogyakarta
- Kurniawan, Indra Suyoto. 2016. "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Kinerja:Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Mulawarman, Vol.13, No.1*.
- Kusuma, Febry Perdana, dkk.2016. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana".*E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 5, No.12, Hal. 4115-4150*.
- Lubis, Nurliza. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan". *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

- Maksyur, Noprial Valenra. 2015. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)". *Jurnal JOM, FEKON Universitas Riau*, Vol.2, No.2.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Marlinawati, 2018. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul)". *Skripsi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Nihayah, Anisatin. 2015. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Karasidenan Pati)". *E-Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ningtyas, Widyawati. 2015. "Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ". *E-Jurnal.Vol.4.No.1.Tahun.201*
- Nuraini Rahayu, H.Karamoy, W.Pontoh. 2014 "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Manado".*Jurnal EMBA 13 Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal.11-20*.
- Nurillah. 2016. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)". *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang 2014*.
- Pemerintah Indonesia.Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- ,Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- ,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- ,Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
- ,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.
- ,Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat).

- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- , Peraturan Menteri Keuangan Nomer 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.
- Pramudiarta, Rizal. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)". *Skripsi, Universitas Diponegoro*.
- Putri, dkk 2017. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *e-Proceeding of Management: Vol.4.No.2. Agustus 2017*
- Rahman Arif, 2017. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang)". *Jurnal Akuntansi. Vol.5.No.1. Tahun. 2017*
- Rahmi Syafarina, 2016. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat)"
- Safrida Yuliani, 2010. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)". *Jurnal Telah Dan Riset Akuntansi Vol.3.No.2. Juli. 2010*
- Silviana. 2014. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat". *E-Jurnal. Vol.6, No.1. Tahun. 2014*
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suparman dkk, 2014. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng". *Jurnal Vol.2 No.1 Tahun 2014*.
- Susanti Lina, 2018. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang PP No 71 Tahun 2010, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kulonprogo)". *Skripsi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Trisaputra, Andry. 2013. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)". *E-Jurnal, Universitas Negeri Padang*.
- Triwardana, 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)". *E-Jurnal.Vol.4, No.1. Tahun.2017*

Wansyah, Hendra, dkk.2012. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh". *E-Jurnal, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*.

Wati, dkk. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas pendidikan Ganesha.Vol.2.No.1.Tahun.2014*

Widiastuti, Ruri. 2013. "Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)". *Skripsi, Universitas Widyatama*.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia

Yuliana, Linna. 2016. "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pengalaman Kerja dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo)". *Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

<http://www.kepripov.go.id>, diakses tanggal 20 November 201